

Penyuluhan Hukum Bagi Pengurus Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi Tentang Pembentukan Badan Usaha

Wahyudi¹✉, Yulia Listianti²

¹Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia, 40132

²Administrasi Keuangan, Politeknik Piksi Ganesha, Bandung, Indonesia, 40274

E-mail : wahyudi@email.unikom.ac.id ✉

Info Artikel:

Diterima: 18 Desember 2024

Diperbaiki: 20 Desember 2024

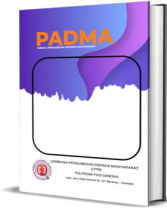
Disetujui: 22 Desember 2024

Keywords: Legal Counseling, Cooperatives, Business Entities, Community Service, Legality

Abstract: Strengthening legal understanding for cooperative administrators is a strategic step to improve business sustainability and cooperative legal protection. This community service activity aims to provide legal counseling to the management of the Hikmah Berkah Silaturahmi Cooperative regarding the formation of business entities in accordance with laws and regulations. The methods used are interactive lectures and group discussions with a participatory approach. Counseling includes a basic understanding of cooperatives as legal entities, the stages of establishing a business entity, and the benefits of legality in cooperative activities. The results of the activity showed an increase in the knowledge and understanding of cooperative management related to the process of forming business entities, including administrative and technical requirements that must be met. In addition, this activity succeeded in building awareness of the importance of legality as legal protection for cooperatives in facing operational challenges. This counseling has a positive impact in the form of motivation for cooperative management to immediately realize the formation of a more structured and legal business entity. The sustainability of this program is expected to encourage the development of cooperatives as a more professional and accountable economic institution.

Kata Kunci: penyuluhan hukum, koperasi, badan usaha, pengabdian masyarakat, legalitas

Abstrak: Penguatan pemahaman hukum bagi pengurus koperasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keberlanjutan usaha dan perlindungan hukum koperasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum kepada pengurus Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi mengenai



pembentukan badan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif dan diskusi kelompok dengan pendekatan partisipatif. Penyuluhan mencakup pemahaman dasar tentang koperasi sebagai badan hukum, tahapan pembentukan badan usaha, dan manfaat legalitas dalam kegiatan koperasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pengurus koperasi terkait proses pembentukan badan usaha, termasuk syarat administratif dan teknis yang harus dipenuhi. Selain itu, kegiatan ini berhasil membangun kesadaran akan pentingnya legalitas sebagai perlindungan hukum bagi koperasi dalam menghadapi tantangan operasional. Penyuluhan ini memberikan dampak positif berupa motivasi pengurus koperasi untuk segera merealisasikan pembentukan badan usaha yang lebih terstruktur dan legal. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat mendorong pengembangan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang lebih profesional dan akuntabel.

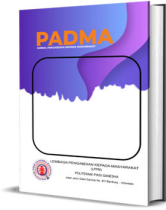
Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.¹ Sebagai entitas yang berbasis pada nilai-nilai kebersamaan, koperasi berperan strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).² Namun, meskipun potensinya besar, koperasi seringkali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan pemahaman hukum di kalangan pengurusnya.

Dalam menjalankan aktivitasnya, koperasi harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar mampu beroperasi secara legal dan mendapatkan

¹ Ananda Putri Nur Amalia Wahyudi, "Tata Cara Pendaftaran Merek Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Lingkungan Karang Taruna Padalarang Kabupaten Bandung Barat," *Diseminasi* 4, no. 1 (2022): 15–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.33830/diseminasiabdimas.v4i1.1957>.

² Dian Marlina Verawati Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa," *Jurnal REP: Riset Ekonomi Pembangunan* 4, no. 2 (2019): 137–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>.



perlindungan hukum. Salah satu langkah penting dalam proses tersebut adalah pembentukan badan usaha yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Badan usaha tidak hanya memberikan legalitas formal, tetapi juga meningkatkan kredibilitas koperasi di mata anggota, mitra bisnis, dan masyarakat luas. Namun, kenyataannya, banyak pengurus koperasi yang masih belum memahami pentingnya aspek hukum dalam pengelolaan koperasi.³ Hal ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan, mulai dari kesulitan mendapatkan akses pendanaan hingga potensi sengketa hukum yang merugikan.

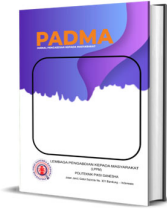


Gambar 1 : Spanduk PKM

Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi adalah salah satu koperasi yang memiliki potensi besar untuk berkembang, namun menghadapi tantangan dalam hal pemahaman hukum oleh pengurusnya.⁴ Sebagai organisasi yang berorientasi pada pengembangan kesejahteraan anggotanya, koperasi ini membutuhkan pendampingan khusus agar dapat memaksimalkan fungsinya sebagai badan usaha yang legal dan profesional. Salah satu aspek yang perlu ditekankan adalah pentingnya penyuluhan hukum bagi pengurus koperasi terkait pembentukan badan usaha. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses pembentukan badan usaha, manfaatnya, serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan koperasi beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

³ Ary Subiyantoro Endah Wening Budiningrum, "Sistem Informasi Akuntansi Koperasi Untuk Meningkatkan Daya Saing Pengelolaan Koperasi," *Jurnal Economina* 2, no. 3 (2023): 738–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/economina.v2i3.389>.

⁴ Wahyudi, "Sosialisasi Ketentuan Perubahan Struktur Koperasi Di Era Pandemi Covid 19 Bersama Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)* 2, no. 2 (2022): 194–203, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jpkmi.v2i2.280>.



Pembentukan badan usaha yang legal memiliki berbagai manfaat strategis bagi koperasi.⁵ Pertama, legalitas badan usaha memberikan dasar hukum yang kuat bagi koperasi dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Hal ini penting untuk melindungi koperasi dari potensi masalah hukum yang dapat muncul di kemudian hari. Kedua, legalitas badan usaha meningkatkan kepercayaan pihak eksternal, seperti mitra bisnis dan lembaga keuangan, sehingga koperasi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk kerja sama maupun akses pendanaan. Ketiga, pembentukan badan usaha yang legal memudahkan koperasi dalam menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban kepada anggota serta pihak berwenang, yang pada akhirnya mendukung transparansi dan akuntabilitas koperasi.

Tantangan utama dalam proses pembentukan badan usaha salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengurus koperasi mengenai aspek hukum yang relevan.⁶ Banyak pengurus yang masih menganggap bahwa legalitas badan usaha adalah hal yang rumit dan memerlukan biaya tinggi, sehingga cenderung mengabaikan aspek ini. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan teknis seringkali menjadi kendala dalam merealisasikan pembentukan badan usaha yang sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pengurus koperasi, salah satunya melalui program penyuluhan hukum.

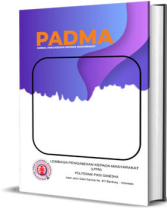
Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis⁷ kepada kelompok sasaran, dalam hal ini pengurus koperasi. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek teoretis, tetapi juga memberikan panduan praktis yang dapat langsung diterapkan oleh pengurus koperasi. Penyuluhan ini melibatkan berbagai metode, seperti ceramah, diskusi interaktif, simulasi, dan pendampingan langsung, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan diterapkan secara efektif. Dalam konteks Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi, penyuluhan hukum ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengurus koperasi terkait pembentukan badan usaha yang legal.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, di mana pengurus koperasi diajak untuk terlibat secara aktif dalam setiap tahapan

⁵ Rudy Suryanto Harjanti Widiastuti, Wahyu Manuhara Putra, Evy Rahman Utami, "Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Di Indonesia," *JEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 22, no. 2 (2019): 257–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>.

⁶ Dewi Indah Sari Dewi Ambarwati, Joni, Imam Buhari, Dian Aisya Putri, "Pemetaan Peluang Dan Tantangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Focus Group Discussion (Fgd) Di Desa Kesamben, Kabupaten Malang," *Studi Kasus Inovasi Ekonomi* 6, no. 2 (2022): 53–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/skie.v6i02.22334>.

⁷ Yul Erniss, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477–96, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>.



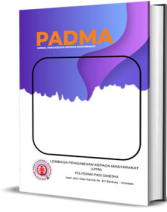
kegiatan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan komitmen pengurus koperasi terhadap pentingnya legalitas badan usaha dalam mendukung pengelolaan koperasi yang profesional dan berkelanjutan. Materi yang disampaikan meliputi dasar-dasar hukum koperasi, proses pembentukan badan usaha, persyaratan administratif dan teknis, serta manfaat legalitas bagi koperasi. Selain itu, penyuluhan ini juga memberikan kesempatan kepada pengurus koperasi untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman, sehingga materi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengurus koperasi tentang pentingnya legalitas badan usaha dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapainya. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pengurus koperasi untuk mengambil langkah konkret dalam membentuk badan usaha yang legal, sehingga koperasi dapat beroperasi secara lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Selain memberikan manfaat bagi Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi, kegiatan penyuluhan hukum ini juga diharapkan dapat menjadi model yang dapat direplikasi di koperasi lain dengan tantangan serupa. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak langsung kepada koperasi sasaran, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan koperasi secara lebih luas di tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, program penyuluhan hukum ini memiliki relevansi yang tinggi dalam mendukung pengembangan koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat di Indonesia.

Dalam penyusunan program ini, berbagai pihak telah dilibatkan, termasuk akademisi dan praktisi hukum yang terkait dengan pengembangan koperasi. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang disusun dapat memberikan solusi yang komprehensif dan aplikatif bagi koperasi. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kegiatan penyuluhan hukum ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal bagi Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi.

Penyuluhan hukum bagi pengurus Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi tentang pembentukan badan usaha merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus koperasi dalam mengelola koperasi secara legal dan profesional. Melalui pendekatan partisipatif dan penyampaian materi yang komprehensif, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam, membangun kesadaran, dan mendorong tindakan konkret dari pengurus



koperasi. Dengan demikian, koperasi dapat beroperasi secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi anggotanya serta masyarakat luas.

Metode

Dalam pelaksanaan program penyuluhan hukum bagi pengurus Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi, metode yang digunakan dirancang untuk memastikan efektivitas penyampaian materi dan keterlibatan aktif peserta. Berikut adalah metode yang diterapkan dalam kegiatan ini:

1. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif digunakan untuk melibatkan pengurus koperasi secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Peserta diajak untuk berbagi pengalaman, mengidentifikasi masalah, dan berkontribusi dalam merancang solusi praktis terkait pembentukan badan usaha. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran yang dilakukan.

2. Ceramah Interaktif

Ceramah interaktif digunakan sebagai metode utama dalam menyampaikan materi dasar tentang hukum koperasi dan pembentukan badan usaha. Materi disampaikan secara terstruktur menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dengan penyertaan contoh-contoh kasus nyata untuk membantu peserta memahami konsep secara lebih konkret. Peserta juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan selama sesi berlangsung.

3. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD)

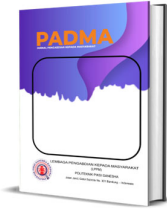
Diskusi kelompok terfokus dilakukan untuk mendalami isu-isu spesifik yang dihadapi oleh Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi. Dalam diskusi ini, peserta dikelompokkan berdasarkan peran atau fungsi mereka dalam koperasi, seperti pengurus inti, pengawas, dan anggota aktif. FGD bertujuan untuk menggali solusi praktis dan membangun konsensus tentang langkah-langkah yang harus diambil.

4. Simulasi dan Studi Kasus

Simulasi dan studi kasus digunakan untuk memberikan pengalaman praktis kepada peserta tentang proses pembentukan badan usaha. Peserta diberikan skenario kasus yang relevan, seperti pengurusan dokumen legal atau pemenuhan persyaratan administratif, dan diminta untuk memecahkan masalah tersebut secara kolaboratif. Metode ini membantu peserta mengasah keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan.

5. Pendampingan Teknis

Setelah sesi penyuluhan, peserta diberikan pendampingan teknis untuk membantu mereka dalam mengurus dokumen legal, melengkapi persyaratan administratif, dan menyelesaikan proses pembentukan badan usaha. Pendampingan



dilakukan secara langsung oleh tim ahli yang berkompeten dalam bidang hukum koperasi.

6. Penggunaan Media dan Materi Pendukung

Untuk mendukung penyampaian materi, digunakan berbagai media dan materi pendukung seperti slide presentasi, leaflet, modul pelatihan, dan video pembelajaran. Materi ini dirancang agar peserta dapat mempelajari ulang secara mandiri setelah kegiatan berlangsung.

7. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman dan kepuasan peserta terhadap program penyuluhan. Metode evaluasi meliputi:

- Pre-test dan post-test: Untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum peserta sebelum dan setelah kegiatan.
- Kuesioner kepuasan: Untuk mendapatkan masukan dari peserta mengenai efektivitas metode penyuluhan.
- Observasi langsung: Untuk menilai partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung.

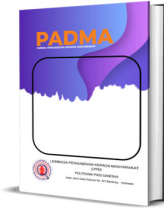
8. Dokumentasi dan Pelaporan

Seluruh kegiatan didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk foto, video, dan laporan tertulis. Dokumentasi ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan referensi untuk pengembangan program serupa di masa depan.

Dengan kombinasi metode ini, program penyuluhan hukum diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada pengurus Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi serta mendorong mereka untuk mengambil langkah konkret dalam pembentukan badan usaha yang legal.

Hasil dan Pembahasan

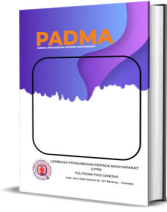
Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi merupakan salah satu entitas ekonomi berbasis masyarakat yang memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. Namun, untuk memaksimalkan peran dan fungsinya, koperasi perlu menjalankan usahanya berdasarkan prinsip legalitas dan tata kelola yang baik. Pembentukan badan usaha merupakan langkah strategis yang tidak hanya memberikan landasan hukum yang kuat, tetapi juga mendukung koperasi dalam mengelola aktivitas ekonominya secara lebih profesional dan akuntabel.



Gambar 2 : Sesi Tanya Jawab

Pembentukan badan usaha merupakan salah satu bentuk adaptasi koperasi terhadap dinamika lingkungan bisnis modern. Dalam konteks ini, koperasi yang memiliki badan usaha dapat lebih mudah menjalin kerja sama dengan mitra strategis, seperti lembaga keuangan, perusahaan swasta, maupun institusi pemerintah. Berikut beberapa manfaat utama pembentukan badan usaha bagi koperasi:

1. Legalitas Operasional Pembentukan badan usaha memberikan landasan hukum yang jelas bagi koperasi. Legalitas ini penting untuk melindungi koperasi dari potensi sengketa hukum yang dapat muncul akibat kurangnya dokumen legal yang sah. Selain itu, legalitas badan usaha memungkinkan koperasi untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akses ke Sumber Daya Eksternal Koperasi dengan badan usaha yang legal memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan akses pendanaan dari berbagai sumber, termasuk perbankan dan investor. Legalitas badan usaha juga meningkatkan kepercayaan mitra bisnis, sehingga koperasi dapat lebih mudah menjalin kemitraan strategis.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Dengan badan usaha yang legal, koperasi diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan secara sistematis dan sesuai standar. Hal ini mendukung transparansi dan akuntabilitas, baik kepada anggota koperasi maupun kepada pihak eksternal, seperti pemerintah dan mitra bisnis.
4. Pengelolaan Risiko Pembentukan badan usaha memungkinkan koperasi untuk memisahkan aset pribadi anggota dengan aset koperasi, sehingga risiko finansial yang mungkin muncul dapat dikelola dengan lebih baik. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi.

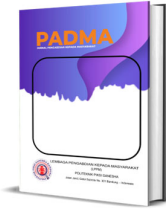


Meskipun memiliki berbagai manfaat, proses pembentukan badan usaha seringkali menghadapi berbagai hambatan, terutama di tingkat koperasi kecil dan menengah. Berikut beberapa hambatan yang umum dihadapi:

1. Kurangnya Pemahaman Hukum Banyak pengurus koperasi yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang aspek hukum yang relevan dengan pembentukan badan usaha. Kurangnya pemahaman ini seringkali mengakibatkan pengabaian terhadap pentingnya legalitas dalam pengelolaan koperasi.
2. Keterbatasan Sumber Daya Proses pembentukan badan usaha memerlukan sumber daya, baik dalam bentuk finansial maupun teknis. Keterbatasan dana sering menjadi kendala utama bagi koperasi untuk mengurus dokumen legal dan memenuhi persyaratan administratif.
3. Prosedur yang Kompleks Prosedur administratif untuk membentuk badan usaha seringkali dianggap rumit oleh pengurus koperasi. Selain itu, kurangnya pendampingan teknis dari pihak yang berkompeten membuat proses ini menjadi lebih sulit untuk diimplementasikan.
4. Minimnya Kesadaran Akan Pentingnya Legalitas Banyak pengurus koperasi yang menganggap legalitas badan usaha sebagai hal yang tidak mendesak, terutama jika koperasi masih beroperasi dalam skala kecil. Sikap ini dapat menghambat perkembangan koperasi dalam jangka panjang.

Program penyuluhan hukum dirancang untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut dengan memberikan pemahaman yang mendalam dan panduan praktis kepada pengurus koperasi. Berikut adalah strategi yang diterapkan dalam kegiatan penyuluhan hukum bagi Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi:

1. Pendekatan Partisipatif Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan melibatkan pengurus koperasi secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan komitmen pengurus koperasi terhadap pentingnya legalitas badan usaha.
2. Penyampaian Materi yang Relevan dan Praktis Materi penyuluhan hukum dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengurus koperasi, dengan fokus pada dasar-dasar hukum koperasi, proses pembentukan badan usaha, dan manfaat legalitas bagi koperasi. Selain itu, materi disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan aplikatif.
3. Simulasi dan Studi Kasus Kegiatan penyuluhan mencakup simulasi dan studi kasus untuk memberikan gambaran praktis tentang proses pembentukan badan usaha. Simulasi ini membantu pengurus koperasi memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dan bagaimana mengatasi tantangan yang mungkin muncul.



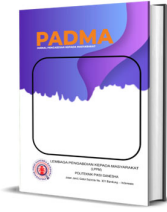
4. Pendampingan Teknis Penyuluhan hukum dilengkapi dengan pendampingan teknis untuk membantu pengurus koperasi dalam mengurus dokumen legal dan memenuhi persyaratan administratif. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi dapat menyelesaikan proses pembentukan badan usaha dengan baik.

Penyuluhan hukum bagi Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi telah memberikan dampak positif dalam berbagai aspek, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang:

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Kegiatan penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman pengurus koperasi tentang pentingnya legalitas badan usaha dan proses yang harus dilakukan untuk mencapainya. Pengurus koperasi juga lebih memahami implikasi hukum dari pengelolaan koperasi yang tidak memiliki badan usaha yang legal.
2. Motivasi untuk Bertindak Penyuluhan hukum telah membangun motivasi di kalangan pengurus koperasi untuk segera mengambil langkah konkret dalam membentuk badan usaha. Pengurus koperasi lebih percaya diri dalam menghadapi proses administratif yang sebelumnya dianggap rumit.
3. Pengembangan Kapasitas Pengurus Selain meningkatkan pemahaman hukum, penyuluhan ini juga mendukung pengembangan kapasitas pengurus koperasi dalam mengelola koperasi secara profesional. Pengurus koperasi lebih siap untuk menghadapi tantangan operasional yang kompleks.
4. Perencanaan yang Lebih Terstruktur Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum, pengurus koperasi dapat menyusun perencanaan yang lebih terstruktur untuk mendukung pengelolaan koperasi dalam jangka panjang. Perencanaan ini mencakup langkah-langkah strategis untuk memperluas jangkauan bisnis koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota.



Gambar 3: Sesi Dokumentasi Penutup Penyuluhan Hukum



Dampak jangka panjang dari penyuluhan hukum ini tidak hanya dirasakan oleh Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi, tetapi juga oleh komunitas lokal dan ekosistem koperasi secara keseluruhan. Berikut beberapa implikasi jangka panjang yang diharapkan:

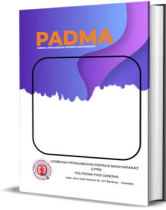
1. Peningkatan Kesejahteraan Anggota Dengan badan usaha yang legal, koperasi dapat menjalankan aktivitas ekonominya secara lebih efisien dan profesional, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota koperasi.
2. Penguatan Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal Koperasi dengan badan usaha yang legal memiliki potensi untuk menjadi motor penggerak perekonomian lokal, terutama dalam mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja.
3. Replikasi Program Model penyuluhan hukum yang diterapkan dapat direplikasi di koperasi lain dengan tantangan serupa, sehingga memberikan dampak yang lebih luas bagi pengembangan koperasi di Indonesia.
4. Peningkatan Kepercayaan Publik Dengan badan usaha yang legal dan tata kelola yang baik, koperasi dapat meningkatkan kepercayaan publik, baik dari anggota maupun dari pihak eksternal. Hal ini penting untuk mendukung keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang.

Kesimpulan

Pembentukan badan usaha merupakan langkah krusial bagi koperasi untuk meningkatkan legalitas, profesionalisme, dan keberlanjutan usahanya. Penyuluhan hukum bagi pengurus koperasi, seperti yang dilakukan pada Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman, motivasi, dan kapasitas pengurus koperasi. Dengan pendekatan partisipatif dan strategi yang relevan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model yang dapat direplikasi untuk mendukung pengembangan koperasi secara lebih luas. Implikasi jangka panjang dari kegiatan ini mencakup peningkatan kesejahteraan anggota, penguatan peran koperasi dalam perekonomian lokal, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Komputer Indonesia, Dekan Fakultas Hukum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ketua Divisi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2M) serta seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya program penyuluhan hukum ini. Penghargaan khusus kami sampaikan kepada pengurus dan anggota Koperasi



Hikmah Berkah Silaturahmi yang telah berpartisipasi aktif dan antusias dalam setiap tahapan kegiatan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim pendamping, fasilitator, dan pihak-pihak lain yang telah memberikan kontribusi, baik berupa tenaga, waktu, maupun pemikiran, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga upaya bersama ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi pengembangan koperasi dan masyarakat luas.

Referensi

- Dewi Ambarwati, Joni, Imam Buhari, Dian Aisya Putri, Dewi Indah Sari. "Pemetaan Peluang Dan Tantangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Focus Group Discussion (Fgd) Di Desa Kesamben, Kabupaten Malang." *Studi Kasus Inovasi Ekonomi* 6, no. 2 (2022): 53–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/skie.v6i02.22334>.
- Endah Wening Budiningrum, Ary Subiyantoro. "Sistem Informasi Akuntansi Koperasi Untuk Meningkatkan Daya Saing Pengelolaan Koperasi." *Jurnal Economina* 2, no. 3 (2023): 738–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/economina.v2i3.389>.
- Ernis, Yul. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>.
- Harjanti Widiastuti, Wahyu Manuhara Putra, Evy Rahman Utami, Rudy Suryanto. "Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Di Indonesia." *JEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 22, no. 2 (2019): 257–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>.
- Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Vrawati. "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa." *Jurnal REP: Riset Ekonomi Pembangunan* 4, no. 2 (2019): 137–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>.
- Wahyudi. "Sosialisasi Ketentuan Perubahan Struktur Koperasi Di Era Pandemi Covid 19 Bersama Koperasi Hikmah Berkah Silaturahmi." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)* 2, no. 2 (2022): 194–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jpkmi.v2i2.280>.
- Wahyudi, Ananda Putri Nur Amalia. "Tata Cara Pendaftaran Merek Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Lingkungan Karang Taruna Padalarang Kabupaten Bandung Barat." *Diseminasi* 4, no. 1 (2022): 15–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.33830/diseminasiabdimas.v4i1.1957>.